

NASKAH PUBLIKASI

Dominasi Partai Golkar Di Kabupaten Bone Pasca Reformasi

Muh Qadri

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2018

Email: Muhqadry@gmail.com

NASKA PUBLIKASI

“DOMINASI PARTAI GOLKAR DI KABUPATEN BONE PASCA REFORMASI”

Disusun Oleh:

Muh Qadri

20140520246

Telah disetujui dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018

Tempat : R. Referensi Ilmu pemerintahan

Jam : 11.00- 12.00 WIB

Dosen Pembimbing



Dr. Suswanta, M.Si

Mengetahui

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Dr. Muchammad Zaenuri, S.IP.M.Si



Dr. Tiun Purwaningsih, S.IP M.SI

Dominasi Partai Golkar Di Kabupaten Bone Pasca Reformasi

Muh Qadri

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: Muhqadry@gmail.com

Abstrak

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa dominasi partai Golkar di kabupaten Bone selama ini. Bentuk dominasi partai Golkar melalui, Pertama **Dominasi Birokrasi** masih terjadi pengangkatan jabatan birokrasi karena faktor rasa balas jasa dari tim simpatisan pemenang partai Politik Golkar. Kedua **Dominasi Sosial** bahwa Golkar jika dilihat dari kader-kadernya rata-rata memiliki figur yang kuat dikalangan masyarakat. karena memiliki kualitas mumpuni, seorang bangsawan, dan beberapa memiliki klan-klan politik yang besar. Ketiga **Dominasi Politik** dan Kekuasaan adanya sinergitas dan saling memberikan *supporting* antara dua lembaga besar yaitu Lagilastif dan Eksekutif karena berasal dari partai yang sama yaitu Golkar. Adapun dampak Dominasi partai Golkar di Kabupaten Bone yaitu Eksploitasi Kekuasaan, Penetrasi Kekuasaan dan Hegemoni Kekuasaan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Golkar yang selama ini harusnya menjadi cerminan bagi partai lain dan masyarakat untuk menciptakan suasana demokrasi yang mulia dengan dasar kesejahteraan rakyat. Jika melihat kembali dari arus sejarah lengsernya Golkar pasca reformasi harusnya muncul babak baru yang lebih demokratis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan politik praktis yang lebih harmonis. Kekuasaan Golkar yang masih kokoh di Kabupaten Bone cenderung melahirkan dedikasi politik busuk yang menguasai dari segala arah sehingga keterlibatan masyarakat dalam praktek politik seakan merujuk dalam tekanan partai Golkar sebagai partai penguasa. Hegemoni kekuasaan Golkar yang selama ini di Kabupaten Bone beberapa elit-elit politik memiliki ketergantungan terhadap Golkar dengan harapan Golkar menjadi tulang punggungnya untuk mengantarkannya duduk dibangku pemerintahan. Tekanan politik dari Partai Golkar para elit-elit politik yang berhasil duduk sebagai pemerintah harus tunduk terhadap intruksi partai yang condong akan kepentingan partai dari pada kepentingan masyarakat. Sederhananya adalah jika partai Golkar akan terus-menerus mendominasi kekuasaan di Bone akan membatasi ruang gerak demokrasi bagi masyarakat, keberpihakan pemerintahan terhadap partai lebih dominan dari pada kepentingan masyarakat, nilai-nilai kebenaran dalam politik praktis akan hilang dari kemuliaan demokrasi.

Kata Kunci: *Partai Politik, Dominasi Sosial, Dominasi Birokrasi, Dominasi Politik dan Kekuasaan, Eskploitasi Kekuasaan, Penetrasi Kekuasaan, dan Hegemoni Kekuasaan*

Abstrac

This study aims to examine how is the domination of Golkar Political Parties in Bone Regency from post-reform until now. This study focuses on how is the form of dominance of Golkar party in Bone from post-reform until now. The result shows that there are three forms of Golkar domination; first, the Domination of Bureaucracy still happen such as there is appointment of bureaucracy because a sense of reward from the Golkar political party winning sympathizers. Second, the Social Domination which can be seen through the Cadres of Golkar who has strong figure among the community for example because they have good qualities, a nobleman, and some are have large political clans. Third, the Political Domination and Power, there is synergy and supporting each other between two major institutions, namely Legilastive and Executive because they come from the same party, Golkar. The impact Golkar party domination in Bone is the Exploitation of Power, Penetration of Power and Power of Hegemony.

The conclusion of this study shows that Golkar should be a reflection for other parties and community to create a noble democratic atmosphere for the basis to gain people's welfare. If it is seen from the historical flow of Golkar's post-reform fallout, a new and more democratic stage must emerge to increase public participation in the success of more harmonious practical politics. Golkar's power which is still strong in Bone tends to create rotten political dedication that controls from all directions, so that community involvement in political practice refer to the pressure of the Golkar party as the ruling party. The hegemony of Golkar's power in Bone can be seen through a number of political elites who have a dependency on Golkar with the hope that they will become its backbone to brng them to the government.

The political pressure appears from the Golkar Party is political elites who succeeded in sitting as the government must submit to party instructions which are inclined to the interests of the party rather than the society. Simply put, if the Golkar party will continue to dominate power in Bone, it will limit the space of democracy for society, the government's alignment with the party is more dominant than the interests of society, the truth values in practical politics will disappear from the glory of democracy.

Keywords: Political Parties, Social Domination, Bureaucracy Domination, Domination of Politics and Power, Exploitation of Power, Power Penetration, and Power Hegemony

A. Pendahuluan

Studi ini menarik untuk dikaji mengingat dominasi Partai Golongan Karya atau biasa disebut Golkar di Kabupaten Bone sudah berjalan sejak lama dan menghasilkan dampak-dampak lain dari proses konsolidasi demokrasi dan tatanan politik. Bahwasanya Partai Golkar di Kabupaten Bone semenjak era reformasi hingga saat ini senantiasa tampil sebagai Partai pemenang dengan perolehan suara terbanyak dari Partai-Partai lainnya. Dalam studi ini lebih tertuju pada bentuk dan dampak dominasi Partai Golkar di Kabupaten Bone, sebab Partai Golkar selalu dan selalu meraih kursi terbanyak dan suara terbanyak pada perhelatan politik baik dalam pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan Legislatif.

Adapun unsur-unsur kekuasaan/dominasi Golkar yang masih bisa dipertahankan di Kabupaten Bone. **pertama** bisa mendominasi kekuasaan dalam hal ini kekuatan agar pengikut bisa bertahan dan menyebarluaskan kekuatan Partai terhadap kader-kader Partai manapun pengikutnya, strategi yang digunakan Golkar untuk mempertahankan massa sampai sekarang yaitu memanfaatkan efek orde baru dimana keterlibatan dari tokoh-tokoh masyarakat masih mengakar sampai kebawah dan masih digunakan sampai sekarang, contohnya mulai kepala desa, tokoh-tokoh agama, kelompok petani, komunitas nelayan, pemuda, dan kepala dusun merupakan simpatisan dari Golkar. Poin **kedua** untuk mendominasi politik yang dikedepankan skil untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain agar dapat diikuti parpol yang ditawarnya, maka sama halnya pada perilaku elit-elit politik Golkar di Bone memperbanyak dengan kegiatan-kegiatan sosial kemudian beradaptasi langsung dengan masyarakat dan mencoba menawari program yang pro terhadap masyarakat. Kegiatan sosial ini juga dibarengi kepentingan politik sehingga kedepannya ikut berpartisipasi untuk memenagkan Golkar pada pemilu yang akan datang. Yang **ketiga** sosok kepemimpinan dibutuhkan masyarakat Bone yang memiliki figur kuat, pengalaman, wawasan, dan bangsawan. Maka inilah menjadi tolak ukur untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi politik Partai Golkar di Bone. Kekuasaan Golkar di Bone tidak terlepas dengan dukungan kader-kader terbaiknya yaitu dengan memiliki kualitas, wawasan dan yang memiliki garis keturunan raja atau *Arung*. Dengan gelar kebangsawannya yaitu *andi*, *petta*, *daeng* dan *puang* sehingga dari kader-kader Golkar rata-rata memiliki figur yang kuat, kemudian memiliki wawasan yang lebih luas dan memiliki pengalaman politik yang luar biasa. Kemudian Golkar juga merupakan Partai yang mayoritas kadernya memiliki keturunan darahh biru atau *Arung* dan ini masih sampai sekarang. Dalam pola pikir masyarakat bahwa pemimpin kita alangkah baiknya yang bergelar *Andi* atau *puang* yang merupakan garis keturunan bangsawan sehingga secara *histori* mantan Bupati Bone mayoritas dari kaum bangsawan. Inilah beberapa unsur-unsur untuk mempertahankan kekuasaan Partai Golkar di Kabupaten Bone. Kekuasaan politik juga merupakan bagian dari kekuasaan sosial, birokrasi dan politik. inilah ciri-ciri yang harus diambil fokus pada pemerintah daerah yakni memiliki kekuatan disuatu daerah untuk tetap menjadi penguasa yang bisa dibawa ke masa depan Partai, paling otoratif yaitu sebagai pemegang kekuasaan harus tetap bersikap otoriter agar tetap menjadi penguasa yang tidak dapat dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan lain diluar kepentingan Partai.

Statistik kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Bone disetiap pemilu pasca reformasi mulai tahun 1999, 2004, 2009 hingga 2014. Pada pemilihan umum 1999 antara

lain bisa dilihat kemenangan Partai Golkar di DPRD ditandai dengan mendapatkan 44 kursi ditingkat provinsi, di Makassar Partai Golkar mendapatkan 22 kursi DPRD tingkat kota, sedangkan keunggulan Partai Golkar lebih dominan di Kabupaten Bone dengan meraih 31 kursi dari 45 kursi. Pada pemilu 2004 Golkar kembali memenangkan secara mutlak di Kabupaten Bone dengan perolehan 28 kursi dari 45 kursi. Pada tahun 2009 Partai Golkar meraih 18 kursi dari 45 kursi. Sedangkan hasil rekapitulasi perolehan kursi dalam pemilu 2014 di Kabupaten Bone Partai Golkar masih dominan dengan mendapatkan 15 kursi dari 45 kursi (KPUD Bone).

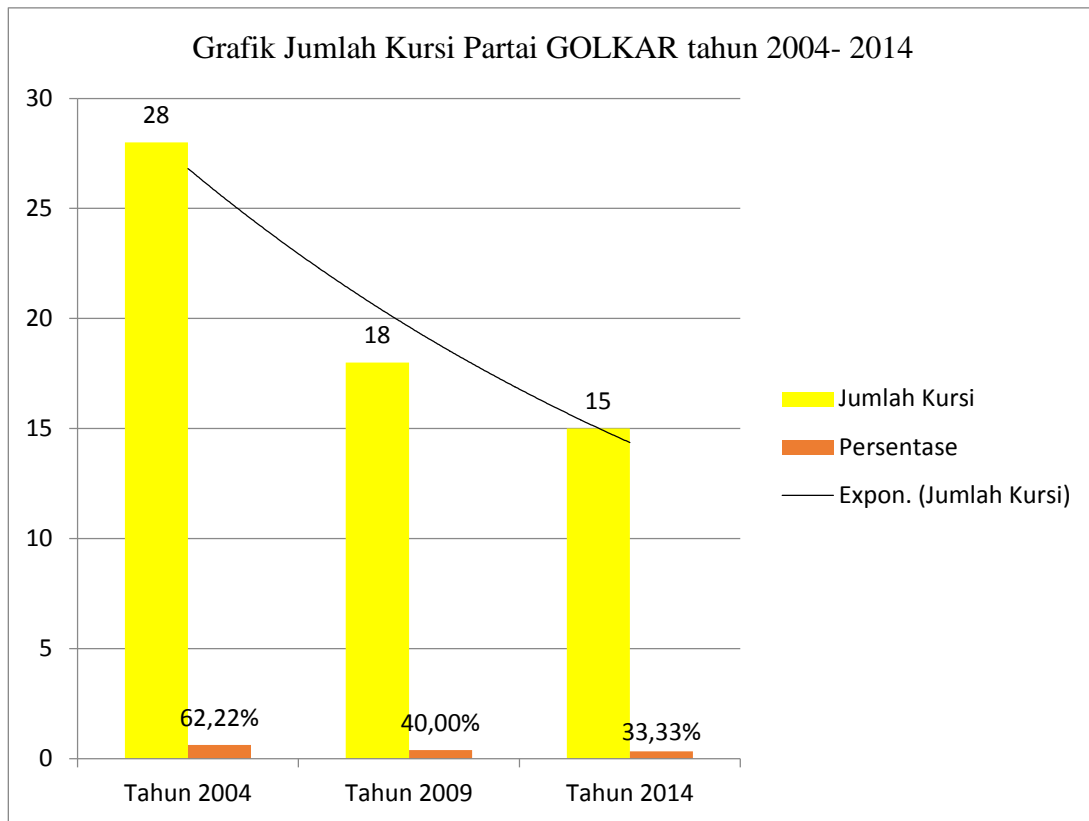
Data ini menunjukkan Partai Golkar di Makassar dan Bone tetap unggul meskipun trennya menurun. Berdasarkan data tersebut menunjukkan mesin politik Partai Golkar di Kabupaten Bone masih dominan dari pada di kota Makassar. Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa efektifitas kemenangan Partai Golkar terletak pada masyarakat terbelakang atau pinggiran dan sebaliknya Golkar semakin lemah pada wilayah perkotaan yang penduduknya memiliki rata-rata bersikap kritis (Syamsuddin Haris: 2005).

Tabel.1. Nama-nama Bupati Bone Pasca Reformasi

No	Nama	Partai	Priode
1.	Andi Muh Amir	Golkar	1993-1998 dan 1998-2003 (Dua Priode)
2.	Andi Idris Galigo	Golkar	2003-2008 dan 2008-2013 (Dua Priode)
3.	Andi Fashar Fadjalangi	Golkar	2013-2018 dan 2018-2023 (Dua Priode)

Sumber KPUD Kab. Bone

Grafik.1 Jumlah Kursi Partai PILEG Bone Tahun 2004-2014



Sumber KPUD Kabupaten Bone

B. Metode Penelitian

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan langsung untuk tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Data penelitian ini didapatkan dari wawancara langsung dengan:

- a. Ambo Dalle: Wakil Bupati, Wakil Ketua DPD Golkar
- b. A. Irwansyahh: Pengurus Partai Golkar
- c. Suaidi: Anggota DPRD Fraksi Demokrat
- d. H. Rahman: Ketua Fraksi Gerindra
- e. Abu Khair: Ketua Fraksi Nasdem
- f. Ardianto: Alumni HMI Cabang Bone
- g. Feri Afrisal: Pengurus Partai Golkar

2. Dokumentasi

Dokumentasi Menurut (Arikunto, 2015), dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen merupakan salah satu sumber data karena bisa dimanfaatkan untuk menafsirkan, menguji dan meramalkan. Dokumen digunakan untuk keperluan penelitian, menurut (Lincoln, 2015) karena alasan : (a) Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendukung, (b) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian, (c) berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, (d) dokumen harus dicari dan ditemukan, (e) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih

C. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya tidak tertuju pada bagaimana konsep dominasi partai disuatu wilayah tertentu namun penelitian sebelumnya memiliki kesamaan atau perbedaan dalam strategi kemenangan partai disuatu wilayah. Kemudian penelitian sebelumnya juga terdapat bagaimana konsep politik dinasti untuk mempertahankan kedudukan klannya terhadap partai penguasa disuatu wilayah.

Menurut Ardipandanto (2016) Strategi Partai Golkar mempertahankan massa pada masyarakat Sulawesi Selatan. Melakukan pencitraan yaitu pendekatan emosional pada masyarakat dengan cara terjun langsung masyarakat. salah satunya bakti sosial sebagai langkah pendekatan untuk menjaga simpatisan Partai. Maka strategi ini bisa tergolong efektif untuk tetap meloby masyarakat secara langsung.

Menurut Titin (2013) Politik Keekerabatan Dalam Politik Lokal Di Sulawesi Selatan Pada Era Reformasi (Studi Tentang Rekrutmen Politik Pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional Dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009). Yaitu membesarkan klan politik Yasin Limpo agar tetap dapat menguasai birokrasi pemerintahan maka kepentingan yang diperjuangkan adalah kepentingan klan Yasin Limpo.

Menurut Alfianti (2013) Dinamika Penetapan Calon Bupati dari Partai Golkar di Kabupaten Bone Periode 2013-2018. Di kabupaten Bone terdapat fenomena yang menarik bahwa adanya kepentingan beberapa klan untuk menguasai partai Golkar sebagai partai yang paling subur di Bone. Dalam penelitian penulis memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut bahwa adanya kepentingan politik klan untuk cenderung menguasai partai politik penguasa.

Menurut Nurlatifah (2015) Kekuatan Partai PPP sebagai Partai penguasa dikota Tasikmalaya. Tasikmalaya dikenal sebagai Kota santri dimana masyarakat sangat mengagungkan seorang kyiai orang yang terpercaya. Maka dapat disimpulkan bahwa peran dari kyiai terjun didunia politik mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat sehingga ini menjadi tren bahwa seorang kyiai adalah orang yang bisa memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mensek atau tren politik yang terdapat masyarakat dugma yang sudah terbangun adalah partai politik yang berideologi islam sebagai panutan masyarakat.

Menurut Susilo Utomo (2013) PDIP di Jawa Tengah adalah partai yang memiliki basis massa yang kuat dengan doktrin yang terbangun adalah Soekarnoisme. Maka kekuatan PDIP di Jawa Tengah tetap mendominasi kemenangan. Kesamaanya adalah pola yang dibangun adalah isu Soekarnoisme dugma yang sengaja digiring sebagai opini politik agar tetap mendominasi kekuasaan dan politik.

Menurut Kaharuddin (2013) dalam tulisannya Kemenangan Partai Golongan Karya (GOLKAR) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar 2012. Golkar masih menggunakan strategi pada masa orde baru bahwa mereka merasa Golkar adalah pilihannya dan dibesarkan oleh Golkar dan memang selama ini mereka merasa belum pernah dikecewakan oleh orang-orang Golkar. Penelitian ini sesuai dengan pola Golkar di Kabupaten Bone yang masih digunakan sampai sekarang yaitu efek orde baru dengan menjaga massa melalui tokoh masyarakat sebagai simatisan partai. Strategi yang digunakan untuk memenangkan sama yang menjadi pembeda lokasi penelitian.

D. Hasil dan pembahasan

Penelitian ini akan menjelaskan dan menklaborasi dari teori yang digunakan tentang konsep dominasi diantaranya konsep Dominasi birokrasi, Dominasi Sosial dan Dominasi Politik. yang pertama dikemukakan oleh Max Weber yang menjelaskan konsep **dominasi birokrasi** adalah menguasai birokrasi yang menjadikan aparat birokrasi menjadi partner kerja dan partner politik yang bisa ikut serta memenangkan partai pada setiap pemilu. Pasca pemilu terjadi pengangkatan jabatan karena faktor kontrak politik antara birokrasi dan pemerintah yang terpilih. Kemudian penulis mencoba menggambarkan bagaimana peristiwa birokrasi yang terjadi di Kabupaten Bone apakah sesuai dengan teori yang ada. Pemerintah daerah Bone menguasai birokrasi menggunakan dengan berbagai cara yaitu menjadikan birokrasi bagian dari simpatisan partai kemudian pasca pemilu akan dimutasi birokrasi yang menjadi tim sukses Golkar ke jabatan yang lebih strategis. Kemudian konsep kedua **dominasi sosial** yang dikemukakan oleh Hidanius dan Pratto yang memaparkan bahwa unsur terjadinya dominasi sosial yaitu lebih condong dalam dinamika perpolitikan atas unsur ras, agama, kelas, sosial dan klan. Dalam peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bone penulis melihat dari sudut pandang klan-klan yang berkoalisi untuk mendapatkan Golkar. Maka tidak heran jika terjadi perhelatan politik diinternal partai Golkar antara klan-klan yang besar yang ada di Kabupaten Bone. Yang masing-masing memperebutkan Golkar sebagai tulang punggungnya untuk mengantarnya duduk di bangku pemerintahan. Kemudian terakhir **dominasi kekuasaan dan politik** menurut Whindu dan David yang memukakan dominasi politik dan kekuasaan yang cenderung busuk dengan cara meraih kekuasaan akan menjadi pemegang kendali kebijakan sehingga banyak kemungkinan bisa terjadi penindasan. Dalam peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bone penindasan memang tidak terjadi secara kasat mata namun kepentingan-kepentingan yang dibawa untuk terbentuknya sebuah kebijakan lebih dominan kepentingan dari partai penguasa ketimbang kepentingan rakyat.

Untuk lebih detail terkait bagaimana perhelatan politik melalui dominasi birokrasi, sosial dan politik di kabupaten Bone penulis akan menjabarkan beberapa poin pada pembahasan berikut;

1. Bentuk Dominasi

a. Dominasi Birokrasi

Ketika momen pemilihan kepala daerah adalah momentum yang tepat dari partai penguasa dan calon yang diusung yaitu langkah yang efektif pasca kepala daerah yang terpilih selaku Pembina kepegawaian di tingkat daerah justru memanfaatkan momen politiknya, karena yang di prioritaskan adalah orang terdekat, ada hubungan kekerabatan atau balas jasa. Sama halnya yang terjadi di Bone “Semenjak Andi Fahsar Padjalangi dilantik, dalam rentan tahun 2013-2015

telah melakukan beberapa pelantikan dan pergeseran di pemerintahan daerah mulai dari eselon II, III dan VI. Dalam pelaksanaannya banyak pegawai yang dirotasi, permosi, dan demosi. Hal tersebut tentu dilakukan untuk penyegaran dalam organisasi serta evaluasi terhadap pegawai agar mewujudkan visi, misi yang ingin dicapai oleh Bupati” (Roslan: 2016).

Antara dominasi kekuasaan dan dominasi birokrasi antara kepentingan politik yang berujung balas kasi terhadap birokrasi sehingga Golkar sebagai Partai penguasa wewenang untuk mengangkat pendukungnya untuk masuk dalam jabatan yang strategis sangat Nampak, dengan dukungan itu untuk mendominasi Birokrasi merupakan langkah agar birokrasi sejalan dengan Visi Misi dari Bupati. Dominasi Birokrasi di Bone yang cenderung adanya ikatan emosional antara penguasa atau pemerintah dengan bawahan dengan menjanjikan dalam bentuk hadiah atau jabatan yang strategis di birokrasi pemerintahan.

Tabel.2 Kepala Dinas Yang Diangkat di Pemda Bone pasca PILKADA

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Herman SH, MH	Pembina Tk. I. IV/B	Staf Khusus Bupati Bone	Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah
2.	Drs. Sudirman, S.St, M.Si	Pembina Tk. I. IV/B	Staf Khusus Bupati Bone	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
3.	Drs. Aswar	Pembina Tk. I. IV/B	Staf Khusus Sekertaris Daerah	Kepala Dinas Koperasi dan UKM
4.	Drs. Rosalin Hab, S.Sos, M.Si	Pembina Tk. I. IV/B	Staf Khusus Bupati	Kepala Dinas Pendidikan
5.	Drs. H. Syarifuddin	Pembina Tk. I. IV/B	Staf Khusus Asisten Bidang Tata Praja Setda Bone	Kepala Dinas Tata Ruang, Pemukiman Dan Perumahan
6.	Drs. Asiswa	Pembina Tk. IV/A	Staf Khusus Asisten Bidang Tata Praja Setda Bone	Kepala Dinas Perhubungan
7.	Drs. Andi Fajaruddin, MM	Pembina Tk. I. IV/B	Staf Khusus Bupati	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Ir. Wahidah M.Si	Pembina Tk. IV/A	Sekertaris Dinas PU dan SDA	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

Sumber: BKDD Kabupaten Bone

b. Dominasi Sosial

Dominasi sosial dalam tubuh Golkar dipandangan masyarakat Bone belum terlihat secara jelas karena perkembangan politik di Bone masih beputar pada pemuda dan politisi sehingga masyarakat dugma dengan politik klan yang ada mereka hanya mengetahui calon tersebut apabila memiliki garis keturunan bangsawan maka itulah yang cocok untuk menjadi pimpinan masyarakat.

Akan tetapi dalam teori dominasi sosial yang cenderung membentuk hirarki yang berbenturan dengan dinamika politik Golkar di Kabupaten Bone. Golkar di Bone memang diminati dari berbagai politisi yang masing-masing membutuhkan Golkar sebagai kendaraan politiknya sehingga adanya kepentingan politik dari berbagai elit Golkar maka muncul niat untuk menyikrkan Klan yang menguasai Golkar sejak pasca reformasi. Pada tahun 2013 dinamika penetapan calon Bupati berlangsung dilematis dalam pelaksanaanya karena adanya kepentingan antara ketua DPD II Golkar dengan DPP Golkar, yaitu ketua DPD II Golkar Bone yaitu Idris Galigo berkepentingan untuk mencalonkan anaknya untuk dicalonkan Bupati pada priode 2013-2018 sedangakn klan dari Nurdin Halid sebagai pengrus pusat berpentingan untuk mengangkat A. Fashar sebagai calon Bupati dari Golkar.

Tabel.3 Klan Politik Partai Golkar di Kabupaten Bone

No	Nama	Jabatan	Partai	Jabatan dalam Partai
1.	Andi Yaqin Pandjalangi	Anggota DPRD Sul-Sel (2004-2009 dan 2009-2014)	Golkar	Wakil ketua DPD I Golkar Di Sul-Sel
2.	Andi Fashar Padjangi	Bupati Bone (2013-2018 dan 2018- 2023)	Golkar	Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bone
3.	Andi Rio Idris Padjalangi	Anggota DPR RI (2004-2009)	Golkar	Wakil Bendahara Golkar Sul-Sel
4.	Nurdin Halid	Mantan DPR RI	Golkar	Ketua DPD I Golkar Kabupaten Bone
5.	A. kadir Halid	Anggota DPRD Sul-Sel (1999-2004 dan 2009-2013)	Golkar	Wakil Ketua DPD Golkar
6.	Andi Idris Galigo	Bupati Bone (2003-2008 dan 2008- 2013)	Golkar	Ketua DPD II Golkar di Kabupaten Bone 2012
7.	A. Irsyan Irsan Idris Galigo	Anggota DPRD Sul-Sel (2009-2014)	Golkar	
8.	Ambo Dalle	Wakil Bupati (2013-2018)	Golkar	Wakli Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bone
9.	Ade Feri Afrisal		Golkar	Kader Golkar (HAM dan Perundang-undangan)

Sumber berbagai Media dan hasil wawancara

c. Dominasi Politik dan Kekuasaan

Pesta demokrasi pasca reformasi setiap pemilu di Kabupaten Bone baik eksekutif maupun legislatif Golkar dominan meraih kemenangan dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD dan suara terbanyak di pemilihan kepala daerah, karena yang menjadi kekuatan Golkar untuk terus dominasi Bone salah satunya faktornya adalah memanfaatkan efek orde baru dengan doktrin Partai kuning yang ada pada pola pikir masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat memilih Golkar karena bukan faktor program kerja dan juga bukan dari kader yang kuat akan tetapi Golkar memanfaatkan keadaan yang ada dengan *dugma* masyarakat. Pada penjelasan Ardianto sebagai alumni pergerakan HMI. “Antusias masyarakat Bone dalam berpolitik masih terjaga, khusus Partai Golkar sebagai Partai yang lama dimana masyarakat telah terdoktrin sampai sekarang bukan

karena kadernya dan bukan karena programnya tapi dugma terbangun dimasyarakat masih ada sampai sekarang”. (Ardianto: 4/6/2018)

Sehingga benar dalam teori kekuasaan menurut Gramski bahwa dominasi kekuasaan cenderung busuk, ambigu, mempesona sekaligus menakutkan. Mempesona karena cenderung dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menguasai dan mengendalikan. Sehingga dominasi kekuasaan cenderung busuk karena dalam pengambilan keputusan di dominasi dari kelompok mayoritas sehingga dalam mencapai dalam sebuah kesepakatan akan berdampak pada masyarakat. Yang terjadi adalah salah gunakan wewenang dan merampas kebebasan dalam berpendapat, dan mutlak dari kebijakan itu hanya untuk kepentingan kelompoknya tidak lagi menjadi sarana untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam pandangan penulis bahwa Golkar di Kabupaten Bone wewenang dan kekuasaan yang dimiliki Golkar cenderung untuk menguasai orang lain meskipun secara tidak nampak akan tetapi hal ini terjadi didalam internal DPRD yang dilematik dalam memutuskan sebuah kebijakan. Sehingga yang terjadi adalah berusaha mengendalikan Partai lain agar mereka patuh terhadap Partai Golkar sebagai mayoritas, apabila ini terus terjadi maka DPRD Bone bukan lagi sebagai sarana untuk mencapai kepentingan masyarakat.

2. Dampak Dominasi Partai Golkar Di Kabupaten Bone Pasca Reformasi

Dalam tubuh pemerintahan daerah Kabupaten Bone apabila menggunakan teori trias politika antara ketiga fungsi Lembaga pemerintahan berfungsi sebagaimana semestinya dan bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, dimana lembaga legislatif harus mengawasi jalannya roda pemerintah daerah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kemudian lembaga eksekutif menjalankan tugasnya sebagai pemerintah daerah secara professional dan adil kepada masyarakat tanpa membawa kepentingan golongan atau individu. Akan tetapi yang terjadi praktek politik di Kabupaten Bone dimana lembaga-lembaga pemerintahan di Bone dikuasai oleh Partai yang terus mendominasi mulai orde baru hingga paca reformasi saat ini yaitu Partai Golkar. Dominasi Golkar di Bone dengan dua Lembaga tersebut maka terbangunlah sinergitas (kongkalikong) antara keduanya dan saling mendukung dalam kepentingan tertentu sehingga tidak ada *Chek and Blance* dari kedua lembaga tersebut.

Apabila praktek politik ini terus terjadi maka Golkar sebagai Partai yang mendominasi akan terus memperjuangkan kepentingan golongannya diatas kepentingan rakyat. Tentu ini mencederai alur demokrasi kita dimana rakyat tidak mendapatkan ruang gerak demokrasi yang sebenarnya karena dibatasi oleh Partai penguasa, yaitu terjadi pada dominasi birokrasi, dominasi sosial dan dominasi kekuasaan politik. Maka apabila wewenang dari Partai Golkar terus dominan di Kabupaten Bone akan menuai beberapa dampak dominasi kekuasaan dan kepentingan pada masyarakat dan khayalak. Sesuai dengan teori dari (Whindu, 1992) Yaitu:

a. Eksploitasi Kekuasaan

Eksploitasi kekuasaan dari Partai pemerintah dan penguasa telah terjadi di Kabupaten Bone dimana ada penarikan keuntungan secara tidak wajar. Adanya kekuatan Golkar di pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat

daerah Kabupaten Bone menuai berbagai kontroversi dalam sebuah kebijakan karena kepentingan yang dibawa adalah kepentingan kelompok.

Ini dampak dari dominasi Golkar di Kabupaten Bone karena melihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih dominan untuk kepentingan pemerintah dan kebutuhan dari pemerintah itu sendiri. Maka sesuai dengan dasar teori yang ada bahwa Golkar yang dominasi pemerintahan tentu akan mengeksploitasi kekuasaan dalam arti penarikan keuntungan untuk kepentingan kelompok dan individunya secara tidak wajar.

b. Penetrasi Kekuasaan

politik merupakan penekanan pengaruh oleh seorang kepala daerah atau pimpinan politik di daerah dengan tujuan untuk menjaga kekuasaan dari daerah yang dipegangnya. Penetrasi ini dilakukan karena faktor kebijakan-kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan dari pemerintah daerah dapat diamankan sampai pada tingkat bawah, sehingga kepatuhan antara pemerintah dan bawahan dapat mendukung kebijakan yang ada agar berjalan dengan efektif dan efisien, karena penetrasi yang seharusnya dilakukan secara profesional dan terstruktur agar memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik bukan karena kepatuhan terhadap atasan.

Amanat undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki peranan dalam melaksanakan manajemen kepegawaian yang meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan potensi dan pengembangan jumlah. Berdasarkan dari undang-undang tersebut penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi dan otonomisasi daerah dalam menetapkan kepegawaian atau birokrasi di daerah diwarnai dengan politisasi apalagi pasca diadakan PILKADA akan ada mutasi besar-besaran untuk mengikat para tim pemenang untuk menjabat posisi yang strategis.

Seperti halnya penetrasi kekuasaan yang terjadi di Kabupaten Bone kedudukan sebagai pemerintah daerah yang memiliki wewenang dan mengangkat kepegawaian daerah. Di Bone pemerintah daerah akan mengangkat para elit birokrasi yang sebelumnya sebagai simpatisan atau tim pemenang Partai akan dimutasi menjadi partner kabinet kerja untuk mencapai cita-cita Bupati sesuai dengan visi-misi pemerintah yang terpilih.

c. Hegemoni Kekuasaan

Praktek politik Golkar di Kabupaten Bone selaras dengan teori Gramsci agar tetap menjadi Partai yang dominan, langgeng dan abadi. Sehingga pola mengajak simpatisan dan pengakaderannya sesuai dengan catatan Gramsci yang dikembangkan oleh (Heryanto, 1997) yaitu. Dua perangkat kerja yang harus dijaga agar kekuasaan itu abadi. Dalam hal ini Golkar memanfaatkan perangkat kerja yang memang ranah berpolitikannya menyentuh sampai kebawah. Itu masih digunakan sesuai dengan praktek Hegemoni pada masa Orde baru sampai sekarang dengan menguasai Lembaga pemerintahan, organisasi sosial, LSM dan beberapa kelompok-kelompok yang berpengaruh di masyarakat.

Golkar di Kabupaten Bone memang ladang suara terbanyak untuk pada setiap kali pesta demokrasi. Simpatisan dan kader-kader solid yang mengakar sampai pada tingkat desa sehingga kekuatan Golkar di Kabupaten Bone tetap terjaga. Lahirnya politik yang sistematis dan fungsional dari setiap individu kader Golkar yang dapat menarik simpatisan dengan mengajak para toko masyarakat yang berpengaruh dalam satu desa. Memang dalam sejarah Golkar di Indonesia peran dari toko masyarakat dilibatkan sebagai kader Golkar baik tingkat lurahh dan kecamatan dan desa semua dilibatkan sebagai alat tempur dari Golkar untuk menjaga massanya. Kader kader Golkar di Bone masih bisa menjaga hal tersebut meskipun skala nasional Golkar runtuh namun di Bone berkat solidaritas dan loyalitas dalam tubuh Golkar tetap menjaga perolehan suara terbanyak.

Dalam perjalanan Golkar dari masa kemasa memiliki karakteristik berbeda dan tentunya ada peningkatan ataupun penurunan, maka penulis mengklasifikasi pemilih berdasarkan tingkat kecerdasan pemilih mulai dari pemilih pemula dengan standar kecerdasannya mengetahui rekam jejak calon pemimpin, kemudian pemilih yang umur 30-40 tahun yang sudah paham perjalanan politiknya dengan menentukan pilihan calon pemerintah dengan melihat figur meskipun tetap beraada intruksi toko masyarakat, kemudian pemilih yang umur 50-60 tahun masih dugma dalam memilih yaitu adanya efek orde baru dengan tertanamnya pola pikir masyarakat Golkar adalah Partai masyarakat.

E. Kesimpulan

Dari paparan diatas penulis menyimpulkan dari tiga bentuk dominasi yang paling dominan adalah dominasi birokrasi yaitu ASN atau PNS dibawa kendali atau intruksi dari pemerintah daerah dalam hal ini partai Golkar karna memang dari awal pengangkatan jabatan berdasarkan kontrak politik. Sehingga peristiwa mutasi jabatan pasca pemilukada diwarnai dengan tidak profesionalitasnya seorang Bupati dalam pengangkatan kabinet kerja karna yang jadi prioritas adalah tim suksesi pemenang pemilukada sedangkan birokrasi yang tidak ikut serta menyukseskan kemenangan Bupati yang terpilih akan digeser bahkan diberhentikan dari jabatannya dan yang kawan politik dimutasi kejabatan yang lebih strategis.

Bentuk-bentuk dari dominasi kekuasaan Golkar di Kabupaten Bone sampai saat ini yaitu pertama **Dominasi Birokrasi** kurangnya netralitas, adil dan profesionalitas dalam menjalankan tugas ASN yang sesungguhnya. Karena banyaknya tim kemenangan dari Partai Golkar yang duduk sebagai kabinet kerja dan mendapatkan jabatan yang strategis dipemerintahan daerah Kabupaten Bone. Kedua **Dominasi Sosial** adalah adanya politik kekerabatan antara Partai penguasa dengan klan-klan yang besar di Bone. Orang-orang yang besar di Golkar cenderung membesarkan klannya untuk diajukan pada pemilihan yang akan datang. Ketiga **Dominasi politik** adalah ada beberapa kebijakan-kebijakan publik yang cenderung untuk kepentingan-kepentingan Partai penguasa semata. kemudian dominasi politik Golkar di Bone khususnya di DPRD adanya dukungan dari Partai pengusung untuk pemerintah sehingga kurangnya *Chek and Blance* antara legislatif dan eksekutif.

Dampak dari dominasi Partai Golkar di Kabupaten Bone ada tiga poin yaitu; pertama **Eksplorasi Kekuasaan** dari Partai Golkar adalah adanya sinergitas antara DPRD dan Bupati karena berasal dari Partai yang sama, maka dampaknya adalah keluarnya kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan bagi Partai dan kelompoknya. Kedua **Penetrasi Kekuasaan** adanya tekanan dan ancaman dari atasan pemerintah daerah Kabupaten Bone terhadap bawahannya yaitu ASN, Kepala Dinas, Camat, Lurahh, dan kepala desa. untuk menjaga kekuasaanya agar setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Bawahan harus mendukung dan patuh terhadap kebijakan tersebut agar dapat berjalan efektif dan efisien dan sesuai dengan cita-cita dari pemerintah. Ketiga **Hegemoni Kekuasaan** akan selalu terjadi tekanan politik terhadap birokrasi, perangkat desa, lurah, dan camat demi untuk mempertahankan kekuasaanya. strategi yang digunakan Golkar agar tetap eksis sebagai Partai penguasa yaitu pola pengkaderan dan mengajak simpatisan mengakar sampai kebawa. Hegemoni kekuasaan Golkar masih menggunakan cara orde baru dapat mengajak dan mempertahankan simpatisan hingga ke pelosok desa dengan cara meilbatkan simpatisan dari tokoh-tokoh masyarakat mulai dari kepala desa, kepala dusun, tokoh-tokoh agama, petani, nelayan, dan pegusaha sehingga masih kokoh sampai sekarang. Dengan hegemoni kekuasaan Golkar di Bone yang bergerak sampai ke pelosok desa beberapa Partai lain tidak leluasa melakukan perekrutan kader ataupun menagajak simpatisan Partai. Melalui ini berarti beberapa politisi memiliki ketergantungan terhadap Partai Golkar.